

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Rianto, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Divisi Buku Perguruan tinggi PT. Raja Grafindo.
- Darmoko, Ekotjipto, *et.al.* 2010, *Pedoman Pewayangan Berperspektif Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Syahrial Martanto wiryawan, *et.al.*, 2008, *Pokok-pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Iksan, Muchamad, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: PMN.
- Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofyan, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Sunarso, Siswanto, 2015, *Victimologi dalam Sistem Peradilan pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Wagiman, Wahyu, Syahrial Martanto Wiryawan, *et.al.*, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi, Serta Bantuan Bagi saksi dan Korban*, Jakarta: Indonesia Coruption Watch.
- Wijaya, Firman, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku

Wirawan, Syahril Martanto dan Melly Setyowati, 2007, *Pemberian Bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborators*) dalam Tindak Pidana tertentu.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

### **Jurnal/Karya Ilmiah**

Ekayanti, Rika, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 1 : 138 – 149, (Mei 2015).

Muhammad, Rusli, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No.2 Vol.22 (April 2015: 203-222).

Nixson, Syafruddin Kalo, et.al., *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, USU Law Journal, Vol.II-No.2 (November 2013).

Samendawai, Abdul Haris, *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*, Disampaikan Dalam Kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, (17 April 2013).

Tuage, Sharistha Nathalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Lex Crimen*, Volume. II/No. 02, (April-Juni 2013)

Yuhermansyah, Edi, *Urgensi Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Legitimasi, Vol. 1 No.2, (Januari-Juni 2012).

### **Website/Internet**

<http://www.suduthukum.com/2016/09/definisi-saksi-dan-korban.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017, pukul: 14.47.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan,-meringankan,-mahkota-dan-alibi>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017, pukul:14.53.